

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA**

*Jln. Garuda No. 05 Email : [dishub.kotabima@gmail.com](mailto:dishub.kotabima@gmail.com)  
Raba-Bima, NTB*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020 telah dapat terselesaikan. LKIP Dinas Perhubungan sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil akhir kegiatan dan capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas laporan kinerja. LKIP ini dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin. Walaupun demikian, disadari bahwa laporan yang telah disusun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga masih terus memerlukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi evaluasi kinerja Dinas Perhubungan khususnya dan kegiatan pembangunan di Kota Bima pada umumnya.

Raba-Bima, Februari 2020  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BIMA,

**Ir. H. ZULKIFLI, M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP: 19611020 199203 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Umum .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bima .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Kondisi Umum Dinas Perhubungan Kota Bima .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1 Struktur Organisasi .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Tugas Dan Fungsi .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3 Sarana Dan Prasarana Pendukung .....</b>	<b>17</b>
<b>1.4.4 Peluang Dan Tantangan Pengembangan Pelayanan .....</b>	<b>20</b>
<b>1.5 Isu-Isu Strategis .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>23</b>
<b>2.1. Visi &amp; Misi .....</b>	<b>23</b>
<b>2.2. Tujuan &amp; Sasaran .....</b>	<b>24</b>
<b>2.3. Program Kegiatan .....</b>	<b>24</b>
<b>2.4. Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1. Standar Penilaian Capaian .....</b>	<b>26</b>
<b>3.2. Pengukuran Capaian Sasaran .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran .....</b>	<b>27</b>
<b>3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .....</b>	<b>42</b>
<b>3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan             Analisa Program Kegiatan .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Realisasi Anggaran .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 UMUM**

Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju *Good Governance* diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 dan Undang-undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP pada hakikatnya merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*) bukan keluaran semata. Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri.

#### **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan SAKIP;

- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu SAKIP;
- 11) PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan LKIP;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima;
- 14) Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

### **1.3 KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA**

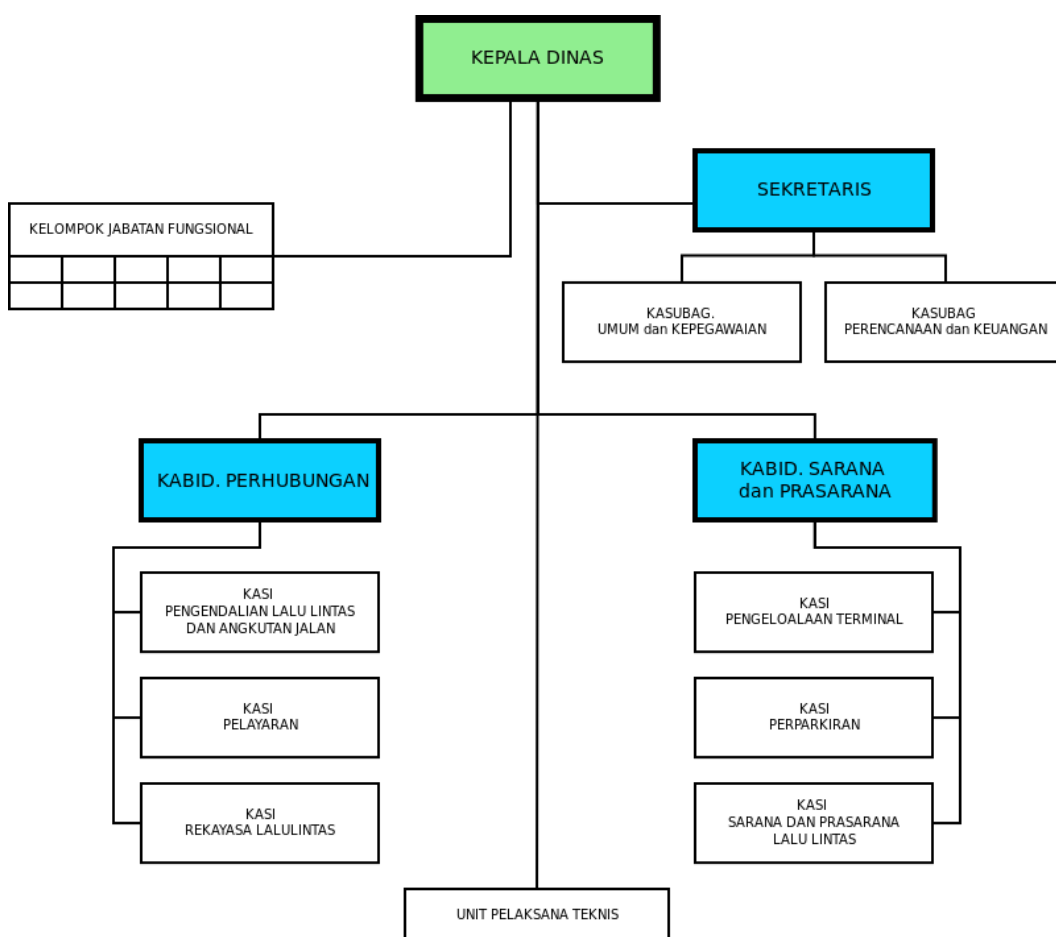
Terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah.

Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Bima sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016. Rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bima diatur melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

## 1.4 KONDISI UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

### 1.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bima ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Sesuai Peraturan tersebut, Dinas Perhubungan terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 (dua) orang Kepala Sub. Bagian (Eselon IV) dan 6 (enam) Kepala Seksi (Eselon IV).



Gambar 1. Struktur Dinas Perhubungan

## 1.4.2 Tugas dan Fungsi

Rincian uraian tugas Dinas Perhubungan Kota Bima adalah sebagai berikut :

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebaigian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas meliputi bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan visi dan misi;
- b) Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk mendukung visi dan misi Kota Bima serta kebijakan;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- d) Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang perhubungan;
- e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian perizinan bidang perhubungan;
- f) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait di bidang perhubungan;
- g) Pembinaan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas perhubungan;
- h) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
- i) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- j) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- k) Penyelenggaraan administrasi di bidang perhubungan;
- l) Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.



b. *Sekretariat*

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program penyusunan laporan dan evaluasi;
- b) Pengelolaan urusan keuangan;
- c) Pengelolaan barang inventaris milik / kekayaan daerah dan negara di lingkungan badan;
- d) Pengelolaan urusan ASN; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

a) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah / negara.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 2) Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai ;
- 3) Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- 5) Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara ;

- 6) Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai ;
- 7) Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

*b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.*

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan ;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan dibidang perhubungan ;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perhubungan ;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
- 6) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perhubungan ;
- 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan ;
- 8) Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan ;
- 9) Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji, perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ; dan

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. *Bidang Perhubungan*

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana umum jaringan transportasi dan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- b) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c) Pembinaan pelaksanaan tugas seksi pengendalian lalu lintas angkutan jalan, seksi perhubungan laut dan seksi rekayasa lalu lintas ;
- d) Pelaksanaan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas transportasi daerah ;
- e) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi ;
- f) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya Kota Bima ;
- g) Penyusunan perumusan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota Bima;
- h) Pemrosesan rekomendasi izin Angkutan kota Dalam Provinsi (AKDP) ;
- i) Pemrosesan rekomendasi izin usaha angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek ;
- j) Penyusunan dan perumusan jaringan jalan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
- k) Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota Bima ;
- l) Pemrosesan rekomendasi operasi angkutan sewa izin usaha angkutan pariwisata dan izin usaha angkutan barang ;
- m) Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan umum dalam daerah ;
- n) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,

alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah ;

- o) Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data statistik terkait tugas bidang perhubungan dalam daerah ;
- p) Pemrosesan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi ;
- q) Penyusunan dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengamanan dan pengawasan lalu lintas ;
- r) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas ;
- s) Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perhubungan.
- t) Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan
- u) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan membawahi :

*a) Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis operasi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya ;
- 2) Penyusunan rencana kerja seksi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan ;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang ;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan pada lingkup tugasnya ;

- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan tugas ;
- 6) Koordinasi, sinkronisasi dalam operasi dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ;
- 7) Penyusunan rencana dan penetapan jadwal kegiatan operasi dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kota Bima ;
- 8) Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
- 9) Pelaksanaan penertiban kelebihan muatan angkutan orang dan angkutan barang ;
- 10) Penyusunan dan penetapan batas maksimum muatan barang dan berat kendaraan yang akan lewat pada jalur jalan yang di tetapkan ;
- 11) Penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan penertiban kendaraan bongkar muat barang ;
- 12) Pembinaan pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf / bawahan yang berprestasi dan berpotensi ;
- 13) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
- 14) Perencanaan studi kajian analisis dampak lalu lintas (Amdalalin) di Kota Bima;
- 15) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan ;
- 16) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya ;
- 17) Pelaksanaan penyelidikan pelanggaran, kelebihan muatan barang di jembatan timbang dan terminal ; dan
- 18) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*b) Seksi Pelayaran*

Seksi pelayaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan jasa pelayaran dan pengelolaan pelabuhan serta penunjang dan fasilitas pelabuhan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pelayaran mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja di bidang pelayaran ;
- 2) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang pelayaran ;
- 3) Pelaksanaan anggaran kegiatan ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait ;
- 5) Pelaksanaan pengawasan atau pemantauan atas pengoperasian kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT7 (GT<7) yang berlayar dilaut ;
- 6) Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang pelayaran ;
- 7) Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan rakyat ;
- 8) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan lokal yang di selenggarakan pemerintahan daerah ;
- 9) Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
- 10) Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah ;
- 11) Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak
- 12) teratur bag : perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas wilayah pelabuhan kota; dan
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*c) Seksi Rekayasa Lalu Lintas*

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengoordinasikan kegiatan rekayasa lalu lintas yaitu manajemen dan perlengkapan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja di bidang rekayasa lalu lintas ;
- 2) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang rekayasa lalu lintas ;
- 3) Pelaksanaan anggaran kegiatan ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait ;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan, data dan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan rekayasa lalu lintas ;
- 6) Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengaturan, perekayasaan pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas ;
- 7) Pelaksanaan indentifikasi masalah lalu lintas ;
- 8) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum ;
- 9) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C ;
- 10) Pengesahan rancangan bangunan terminal tipe C ;
- 11) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota ;
- 12) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota ;
- 13) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ;
- 14) Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan ;
- 15) Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota ;
- 16) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota ; dan
- 17) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan*

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan

penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis rencana umum sarana dan prasarana perhubungan Kota Bima ;
- b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya ;
- c) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana perhubungan ;
- d) Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan ;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya ;

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan membawahi :

a) *Seksi Pengelolaan Terminal*

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen pengelolaan terminal Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja/ SOP pengelolaan terminal ;
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknis operasional pengaturan lalu lintas kendaraan pada petugas terminal ;
- 3) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dalam terminal ;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan penumpang oleh para sopir dan pengusaha angkutan ;



- 5) Penyiapan data dan statistik, informasi / pengumuman kedatangan dan keberangkatan bus dan angkutan penumpang dalam terminal kota ;
- 6) Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi ;
- 7) Penyiapan data statistik terminal barang dan data mengenai pemilik, pengemudi angkutan penumpang, angkutan barang dalam wilayah terminal barang kota ;
- 8) Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya ;
- 9) Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*b) Seksi Perpakiran*

Seksi Perpakiran mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen parkir Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Perpakiran mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja / SOP pengelolaan parkir ;
- 2) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan parkir oleh juru parkir pada titik-titik parkir di wilayah kota ;
- 4) Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi ;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya ;
- 6) Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*c) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas*

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional sarana dan prasarana lalu lintas Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas ;
- 2) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas ;
- 3) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana lalu lintas ;
- 4) Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan ; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*e. Unit Pelaksanaan Teknis*

UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

*f. Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas Fungsional dengan keahlian seperti : menilai kelayakan kendaraan yang akan diterbitkan surat kelayakan operasinalnya.

Jabatan fungsional ini pada OPD Dinas Perhubungan terdapat pada Balai Pengujian Kendaraan bermotor.

**1.4.3 Sarana dan Prasarana Pendukung :**

Sebagai sumber daya pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kota Bima, di bawah ini disajikan data-data yang berkaitan dengan SDM, Sarana dan Prasarana serta ruang lingkup kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, jumlah sumber daya aparatur yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bima sebanyak 148 orang, yang terdiri dari 30 orang PNS dan 118 orang PTT/tenaga teknis operasional dengan rincian sebagai berikut.

*Tabel 1*

*Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan/Ruang*

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	IV/a	2
4	III/d	10
5	III/c	1
6	III/b	4
7	III/a	1
8	II/d	5
9	II/c	1
10	II/b	4
11	II/a	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

*Tabel 2*

*Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan Jenjang Pendidikan*

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	S2	2	6,67
2	S1	15	50
3	D3	1	3,33
4	SLTA	12	40
5	SMP	0	0
6	SD	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

*Tabel 3*

*Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin*

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	26
2	Perempuan	4
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

Tabel 4

*Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Berdasarkan Kualifikasi Teknis*

Kualifikasi	Yang Ada	Ideal	Kurang
<b>Penguji</b>	3	5	2
<b>S1/D4 Transportasi Darat</b>	-	2	2
<b>S1/DIII Ahli LLAJ</b>	-	4	4
<b>PPNS</b>	1	4	3

Jika diperhatikan sumber daya manusia sesuai dengan kenyataan di atas, jelaslah bahwa berdasarkan atas kualifikasi pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan teknologi perhubungan, komunikasi dan informatika masih belum mendukung. Untuk itu, usaha untuk mendapat tambahan aparatur SDM yang secara teknis mampu dan terampil sudah dilakukan, namun sampai saat ini masih belum terpenuhi.

Tabel 5

*Sarana Pendukung*

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	Mobil Operasional	1	
2	Mobil Operasional/Patwal	3	
3	Bus	3	
4	Sepeda Motor Patwal	2	
5	Sepeda Motor	2	
6	Kamera	1	
7	Handycame	1	
8	Laptop	11	
9	HT	5	
10	Komputer	3	
11	Printer	6	
12	Alat Uji Kendaraan (KIR)	2	
13	Terminal Type A (AKAP)	-	Dalam proses Amdal
14	Terminal Type B	1	
15	Terminal Type C	2	
16	Terminal Dump Truck/Bongkar Muat/Gudang	1	Dalam proses Pembangunan Lanjutan (penimbunan tahap II)

Mencermati beberapa data yang tersaji dalam tabel tersebut diatas, kiranya dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi, baik itu sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Dinas.

#### **1.4.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Keberhasilan pembangunan bidang perhubungan ditentukan oleh sinergitas antara pemangku kepentingan di tingkat pemerintah (birokrasi dan legislatif) serta masyarakat/swasta sebagai penerima pelayanan. Peluang ini cukup besar dan prospektif, sebab masyarakat/swasta juga menginginkan komunikasi dan informasi yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan program pembangunan.

Karena itu dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Perhubungan Kota Bima akan memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam melaksanakan program/kegiatan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk mewujudkan semua itu memang tidak mudah.

Beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Bima dalam pengembangan perhubungan ke depan antara lain:

- a. Panjang, lebar, dan jumlah jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliaanya,
- b. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang mengingat adanya persaingan yang cenderung tidak sehat dalam usaha jasa transportasi. Hal ini diperparah lagi oleh aktivitas ojek yang tidak jelas status jasa usahanya dan kontribusinya pada daerah,
- c. Meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan terjadinya percepatan polusi udara, sehingga salah satu item dalam pengujian kendaraan bermotor adalah pengukuran emisi gas buang, disamping untuk memantau kelayakan teknis dan laik jalan kendaraan bersangkutan. Kedepan seyogyanya perlu dilakukan uji emisi untuk semua kendaraan bermotor agar pencemaran udara dapat dicegah dan diminimalisir,
- d. Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas masih perlu dimotivasi dan di tingkatkan,

- e. Kegiatan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan sektor perhubungan masih perlu diperhatikan mengingat produk penelitian masih terbatas,
- f. Anggaran, Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dinas masih perlu ditingkatkan dan dilengkapi untuk meningkatkan kinerja baik administratif maupun operasional.

Dari berbagai tantangan yang ada terdapat solusi yang mungkin saja bisa meminimalisir semua tantangan yang terjadi di antaranya sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia,
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di lingkup Pemerintah Kota Bima dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan,
- c. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal,
- d. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

## 1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Berikut ini adalah isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.

1. Kemacetan lalu lintas di Kota Bima yang semakin memprihatinkan terutama pada ruas-ruas jalan tertentu yang sudah mencapai indeks tingkat pelayanan (ITP) E yang menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan mendekati macet total;
2. Penataan dan pengembangan Terminal Induk Kota Bima sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang representatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan;
3. Komputerisasi system perpajakan dalam wilayah Kota Bima dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa perpajakan;
4. Peremajaan Traffic Light dalam wilayah Kota Bima dengan menggunakan system *Area Traffic Control System (ATCS)*;
5. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor;

6. Melakukan kajian dan mengimplementasikan transportasi jalan dan Laut yang saling berintegrasi (*integrated transportation system*) dalam rangka menarik minat masyarakat Kota Bima dan sekitarnya untuk kembali menghidupkan transportasi Laut;
7. Mengoperasikan angkutan missal dengan wilayah operasi Kota Bima dan sekitarnya;
8. Melakukan peremajaan terhadap angkutan kota tahun pembuatan 1989 kebawah dan/atau yang sudah tidak laik jalan;
9. Membuka rute angkutan kota yang baru pada jalan-jalan arteri atau kawasan pemukiman yang belum dilayani angkutan kota seperti Jalan Lingkar Dalam, Lingkar Selatan, dan Jalan HKS (perumahan) serta lokasi lain dalam wilayah Kota Bima;
10. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan kota termasuk angkutan liar, uji kendaraan bermotor, sertifikat dan dokumen kapal serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan;
11. Pemeliharaan fasilitas Perhubungan baik di jalan maupun di Laut;
12. Pembangunan terminal angkutan barang yang melayani bongkar muat dari dan ke wilayah Bima sehingga untuk pelayanan masuk kota Bima hanya dengan menggunakan mobil barang kecil.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima pada prinsipnya merupakan turunan dari hal-hal yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018–2023. Pada hakekatnya, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima Tahun 2018–2023.

#### **2.1. Visi & Misi**

Visi jangka menengah daerah yang dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: ***“Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri”***

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi Dinas Perhubungan dirumuskan dalam RPJMD sebagai berikut : ***“Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana”***.



## 2.2. Tujuan & Sasaran

Untuk mendukung tercapainya misi maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai selama waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bima adalah **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah.”**

Tabel 2.2.  
Tujuan & Sasaran Straregis Dinas Perhubungan Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	45%	55%	65%	75%	85%
		Persentase peningkatan layaknya angkutan umum	57%	67%	77%	87%	97%

Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan sasaran-sasaran strategis yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2019, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

## 2.3. Program dan kegiatan

### a. Program dan Kegiatan

#### 1. Pengembangan dan pengelolaan terminal

- Pengelolaan terminal

#### 2. Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

- Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

#### 3. Program peningkatan layanan perpajakan

- Pengelolaan dan pengendalian parkir
- Penyediaan fasilitas parkir

4. **Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**
  - Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas
  - Rekayasa lalu lintas
5. **Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**
  - Pelaksana uji kir kendaraan bermotor
  - Pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
6. **Program peningkatan pelayanan angkutan**
  - Peningkatan dan pengembangan angkutan laut
  - Peningkatan dan pengembangan angkutan darat

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Target Kinerja sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Bima dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut:

*Tabel 2.4.*

*Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	45%
		Persentase peningkatan layaknya angkutan umum	57%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1 Standar Penilaian Capaian

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

*Tabel 3.1.  
Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian*

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

#### 3.2 Pengukur Capaian Sasaran

Kategori keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2019, disajikan pada tabel berikut :

*Tabel 3.2.  
Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2019*

No.	Kategori	Sasaran
<b>1</b>	Berhasil	2
<b>2</b>	Cukup Berhasil	0
<b>3</b>	Kurang Berhasil	0
<b>4</b>	Tidak Berhasil	0
<b>Jumlah</b>		2

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Adapun pengukuran capaian kinerja utama pada setiap sasaran strategis adalah :

**Indikator Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik. Realisasi Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik sebesar 78,85% meningkat dari target sebesar 45% dengan capaian sebesar 175%. Atas penilaian tersebut dikategorikan berhasil.

Tabel 3.3

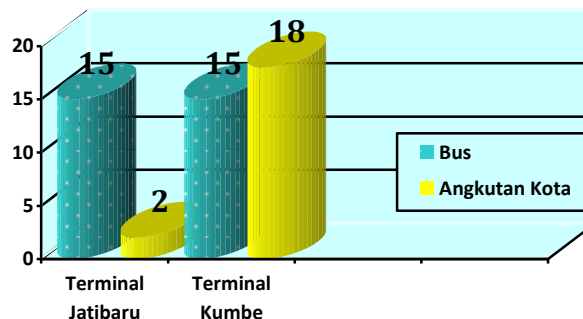
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	45%	78,85%	175

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dengan indikator Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik, meliputi *Program 1* : Pengembangan dan pengelolaan terminal dengan kegiatan pengelolaan terminal. Terminal yang dimiliki Kota Bima saat ini adalah terminal penumpang yaitu Terminal Jatibaru dan Terminal Kumbe. Jenisnya digolongkan menjadi 2 yaitu Angkutan Bus dan Angkutan Kota (Angkot) dimana masih beroperasi dan layak jalan.

Berikut data kendaraan yang beroperasi pada Terminal Jatibaru dan Terminal Kumbe Tahun 2019:

Grafik Jumlah Angkutan Tahun 2019



Rincian Trayek Angkutan pada grafik diatas yaitu pada Terminal Jatibaru jumlah Bus sebanyak 15 unit dengan Jalur Jatibaru-Wera Timur sebanyak 4 unit bus yang beroperasi, Jalur Wera timur-Jatibaru sebanyak 10 unit dan Jalur Wera Barat-Jatibaru sebanyak 1 unit Bus yang beroperasi dimana seluruh Bus yang beroperasi Layak Jalan. Sedangkan Angkutan Kota sebanyak 2 unit dengan Jalur Dara-Jatibaru.

Dan rincian Trayek Angkutan pada Terminal Kumbe, jumlah Bus sebanyak 15 unit dengan Jalur Kumbe-Sape dan Angkutan Kota sebanyak 18 unit Jalur Dara-Kumbe.

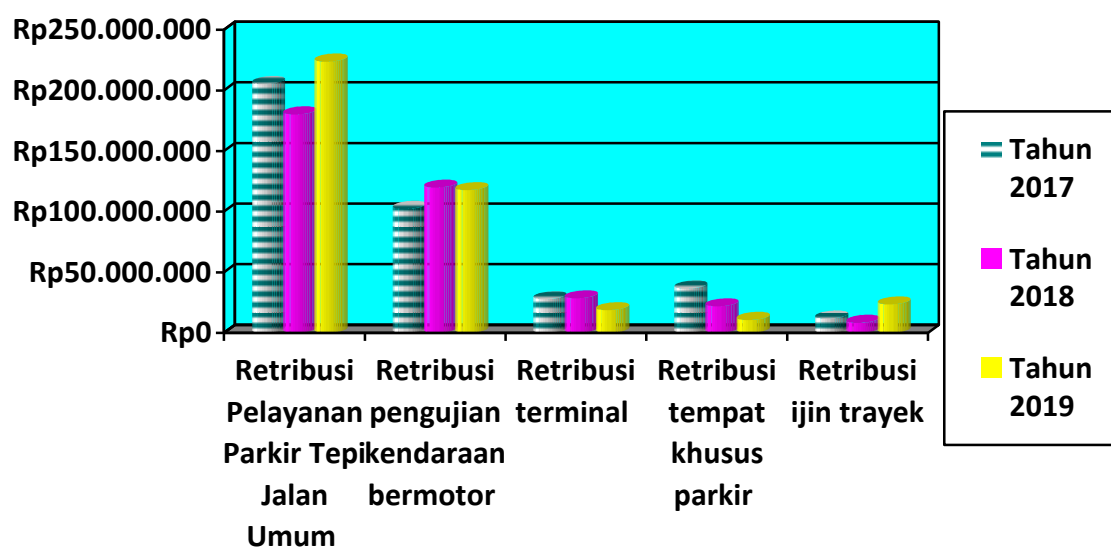
**Faktor pendukung pencapaian kinerja**, meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang layak pada terminal yang dimiliki, sumber daya yang mampu dan siap bekerja, serta ketersediaan anggaran sehingga mendukung tercapainya capaian kinerja. **Harapannya** mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi terminal sebagai sentral aktivitas transportasi dan ekonomi retribusi jasa usaha terminal diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan kas daerah. Hal ini merupakan kesempatan bagi pemerintah kota untuk mendapat tambahan penerimaan karena diberi kewenangan untuk memungut retribusi terminal. **Hambatan dalam pencapaian kinerja**, bertambahnya jumlah kendaraan pribadi sehingga semakin kecil masyarakat yang menggunakan jasa transportasi umum, fasilitas yang dimiliki angkutan umum juga kurang optimal sehingga cenderung masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi

dalam setiap aktifitas tujuannya agar lebih efisien waktu tempuh dan kenyamanan dalam perjalanan, serta kurangnya anggaran untuk peremajaan dan revitalisasi sarana dan prasarana. **Solusi**, perlu adanya peremajaan angkutan sehingga masyarakat yang menggunakan jasa transportasi umum nyaman dan bahagia menggunakan jasanya, waktu tempuh juga dapat diperkecil waktu tempuhnya serta diberikannya anggaran yang baik guna peningkatan fasilitas terminal yang tersedia.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dengan indikator Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik, *Program 2* : Peningkatan layanan perparkiran dengan Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian parkir. Dinas Perhubungan merupakan salah satu dinas penghasil PAD. PAD Parkir dibagi menjadi beberapa retribusi yaitu : Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi terminal, Retribusi tempat khusus parkir, dan Retribusi ijin trayek.

Berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2019 :

*Grafik Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019*



Tabel 3.4

*Uraian Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019*

Nama	Tahun		
	2017	2018	2019
<b>Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum</b>	Rp 205.311.000	Rp 180.216.000	Rp 223.784.000
<b>Retribusi pengujian kendaraan bermotor</b>	Rp 102.280.000	Rp 119.835.000	Rp 117.823.500
<b>Retribusi terminal</b>	Rp 27.705.000	Rp 28.538.000	Rp 18.740.000
<b>Retribusi tempat khusus parkir</b>	Rp 36.498.000	Rp 21.916.000	Rp 10.665.000
<b>Retribusi ijin trayek</b>	Rp 11.700.000	Rp 8.300.000	Rp 23.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 383.494.000</b>	<b>Rp 358.805.000</b>	<b>Rp 394.512.500</b>

Sumber : Realisasi PAD Dinas Perhubungan Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Penerimaan retribusi PAD pada Dinas Perhubungan Kota Bima, pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017 dan tahun 2019 lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya. **Faktor pendukung pencapaian kinerja**, adanya anggaran yang baik guna menunjang kinerja, sumber daya yang unggul, sarana dan fasilitas guna maksimal tercapainya kinerja, adanya koordinasi dengan pihak kamtibmas. **Hambatannya**, kurangnya anggaran, kurangnya pembinaan kepada Jukir, Penyetoran tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati antara Dinas dan Jukir, kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana parkir. **Solusi** yang dibutuhkan agar ditambahnya anggaran untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana parkir, pembinaan kepada jukir-jukir sehingga tercapai kesepakatan PAD yang telah di sepakati bersama.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dengan indikator Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik, *Program 3* : Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan indikator program persentase indeks pengendalian dan pengamanan lalulintas dengan formula indikatornya terukur dengan panjang jalan dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas dikali seratus persen.

Pada data Badan Pusat Statistik Kota Bima, panjang jalan menurut kelas jalan di Kota Bima (km) adalah sepanjang 258,11 km. Terlampir uraiannya :

Indonesia | English

Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BIMA**

Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kota Bima (km), 2010-2018

DATA SENSUS

Tabel Unduh Data

Kelas Jalan	Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kota Bima (km)									
	0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kelas I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelas II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelas III	166.36	166.36	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelas IIIA	122.77	122.77	166.35	166.35	166.35	166.35	166.35	166.35	166.35	166.35
Kelas IIIB	12.70	12.70	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27
Kelas IIIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak Terinci	7.42	8.42	9.72	9.72	9.72	9.72	63.49	63.49	63.49	
Jumlah	309.25	310.25	204.34	204.34	204.34	204.34	258.11	258.11	258.11	

Subjek, Subject	Keterangan	Notes
("Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kota Bima", "Length of Roads by Class in Bima Municipality")	Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima	Source: Public Work Service of Bima Municipality

Tahun ini Publikasi Kota Bima Dalam Angka 2020 SUDAH RILIS, ter

Berikut adalah Tabel Jumlah LAKA Lantas di Kota Bima Tahun 2017 dan 2018 :

**Tabel 3.5**  
**Jumlah LAKA Lantas di Kota Bima**

Bulan	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas per Bulan di Kota Bima (Orang)						
	Meninggal		Luka Berat		Luka Ringan		Total
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
<b>Januari</b>	19	4	7	5	13	3	72
<b>Februari</b>	7	3	4	4	8	2	37
<b>Maret</b>	12	1	7	5	10	2	61
<b>April</b>	16	1	3	5	7	2	64
<b>Mei</b>	7	1	4	5	6	9	45
<b>Juni</b>	4	5	2	6	5	4	20
<b>Juli</b>	21	1	4	7	9	4	83
<b>Agustus</b>	18	1	1	16	4	6	59
<b>September</b>	11	2	0	11	6	10	53
<b>Oktober</b>	16	3	4	4	5	6	64
<b>November</b>	13	2	4	7	9	1	55
<b>Desember</b>	9	6	6	6	8	7	47
<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>56</b>	<b>660</b>

Sumber : Jumlah LAKA LANTAS RESOR KOTA BIMA



Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi kecelakaan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. **Faktor yang mempengaruhi kecelakaan**, Ada empat faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, *pertama* yaitu faktor Kelalaian Pengguna Jalan, faktor ini merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. **Hambatannya**, Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidak tahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan di bawah pengaruh minuman keras, mengantuk karena mengemudi yang sudah melewati ambang batas mengemudi. Solusi yang perlu dilakukan yaitu maksimal 8 jam diselingi dengan istirahat.

*kedua* adalah faktor kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Contohnya seperti rem blong, setir macet, dll. **Solusi** untuk menurunkan tingkat kecelakaan, perlu adanya perawatan dan perbaikan kendaraan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

*ketiga* Faktor Jalan, **hambatan** faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. **Solusinya** yaitu tersedianya fasilitas jalan yang memadai mulus dan lebar.

*keempat* adalah faktor kondisi lingkungan. **Hambatannya**, musim hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang. **Solusinya** agar tidak berkendara jauh dalam cuaca buruk.

**Indikator Sasaran 2** : Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan layaknya angkutan umum. Realisasi Persentase peningkatan layaknya angkutan umum pada tahun 2019 sebesar 77,45% meningkat dari target sebesar 57% dengan capaian sebesar 135,87%. Atas penilaian tersebut dikategorikan berhasil.

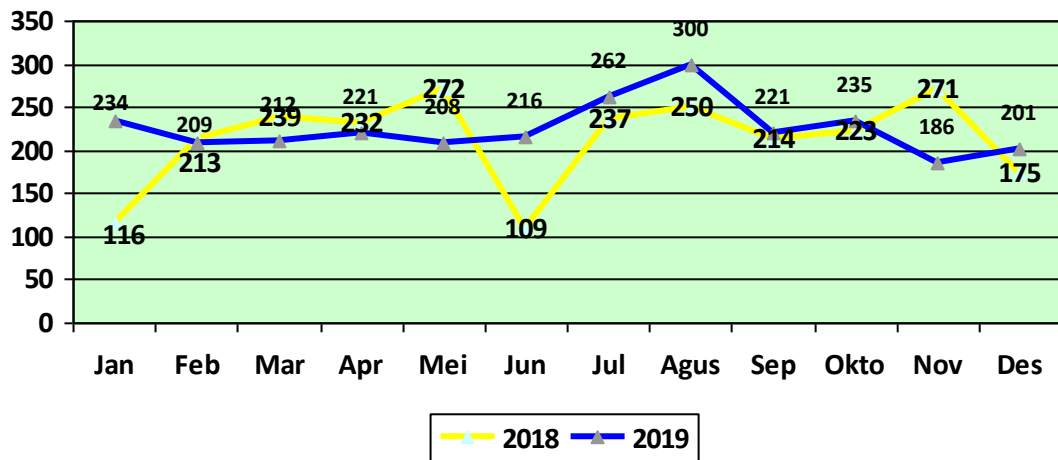
*Tabel 3.6*

*Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Persentase peningkatan layaknya angkutan umum	57%	77,45%	135,87

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dengan indikator Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik, meliputi pelaksanaan Uji KIR Kendaraan Bermotor. Berikut grafik kendaraan yang telah dilakukan Uji KIR pada tahun 2019 :

Grafik kendaraan yang telah dilakukan Uji KIR pada tahun 2019



Kegiatan pada Pegujian Kendaraan Bermotor yaitu serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan guna terciptanya keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan terhadap pengguna jalan, serta pencemaran udara dapat dicegah dan diminimalisir, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan di jalan, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Jenis kendaraan yang melakukan Uji KIR Kendaannya berupa Mobil Barang (pick Up, D.Truck, L.Truck), Mobil Bus (kecil, sedang, besar), Mobil Box (kecil, sedang, besar), Tangki (sedang dan besar), Tronton, Mobil Penumpang, Truck Besar. Dari sekian banyak kendaraan pada Kota Bima diyakini belum semua kendaraan telah melakukan Uji KIR, dengan demikian perlu dilakukannya pengawasan dan pengamanan lalu lintas guna peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor di Kota Bima.

**Faktor pendukung** : Idealnya sebuah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor harus memiliki beberapa Alat Uji sebagai standar untuk digunakan

memeriksa bagian-bagian kendaraan yang layak jalan atau tidak. Seperti Alat Uji Emisi Gas Buang, Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang (Smoke Tester), Alat Uji Kebisingan Suara Klakson Knalpot, Alat Uji Rem, Alat Uji Lampu, Alat Uji Kincup Roda Depan, Alat Uji Penunjuk Kecepatan, Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban, Alat Uji Daya Tembus Cahaya pada Kaca.

**Hambatan :** Faktanya kondisi saat ini Keberadaan aktifitas kegiatan pada KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bima belum memiliki alat-alat tersebut. Sehingga kegiatan pengujian yang dilakukan masih manual tanpa dilengkapi dengan alat-alat Standar uji. Seperti Uji Rem, pengecekan badan kendaraan, emisi gas buang dan sebagainya, seluruhnya dilakukan secara manual.

**Solusi :** Pada Tahun 2020 telah di Rencanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor sehingga mampu mengurai hambatan yang ada, sehingga tercapainya tujuan yang telah ditargetkan. Dan Pengujian Kendaraan Bermotor Juga masuk dalam salah satu penambah Retribusi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bima yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan adanya alat standar diharapkan dapat menambah retribusi PAD Dinas Prhubungan Kota Bima.

Pencapaian indikator kinerja tersebut, didukung oleh sejumlah program dan kegiatan yang sekaligus perwujudan kinerja eselon III dan eselon IV. Adapun rincian program dan kegiatan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran strategis dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

## Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
<b>A.</b>	<b>Pengembangan dan pengelolaan terminal</b>	<b>Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>
1	Terlaksananya Pengelolaan terminal	Jasa pengelolaan terminal	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>B</b>	<b>Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>	<b>45%</b>	<b>93,28%</b>	<b>207,29</b>
1	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100
2	Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Laporan pemeriksaan dan pemeliharaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
<b>C</b>	<b>Program peningkatan layanan perpajakan</b>	<b>Persentase pelayanan jasa perpajakan</b>	<b>32%</b>	<b>82,77%</b>	<b>258,66</b>
1	Pengelolaan dan pengendalian parkir	Jasa pengelolaan dan pengendalian parkir	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Penyediaan fasilitas parkir	Jumlah penyediaan fasilitas parkir	2 Unit	2 Unit	100
<b>D</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Persentase indeks pengendalian dan pengamanan lalulintas</b>	<b>39%</b>	<b>93,53%</b>	<b>239,82</b>
1	Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas	Jumlah Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
2	Rekayasa lalu lintas	Jumlah kegiatan rekayasa lalu lintas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
<b>E</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>57%</b>	<b>96,32%</b>	<b>168,98</b>
1	Pelaksana uji kir kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang telah diuji KIR	4.670 Unit	4.499 Unit	96,33
2	Pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100
<b>F</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>36%</b>	<b>97,25%</b>	<b>270,14</b>
1	Peningkatan dan pengembangan angkutan laut	Dokumen pengembangan angkutan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2	Peningkatan dan pengembangan angkutan darat	Dokumen pengembangan angkutan darat	6 Dokumen	6 Dokumen	100

Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

*Tabel 3.8*  
*Perbandingan Realisasi Kinerja*  
*Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Strategis*

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.	90%	85%	94,44	90%	90%	100
Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	80%	70%	87,50	90%	75%	83,33
Cakupan pelayanan angkutan umum	60%	55%	91,67	75%	65%	86,67
Angka kecelakaan lalu lintas	15	13	86,67	10	11	110
Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase fasilitas terminal yang layak	60%	50%	83,33	45%	45%	100

Mencermati beberapa data yang tersaji dalam tabel tersebut diatas, kiranya dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi, baik itu sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern dinas.

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			REALISASI KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
<b>A.</b>	<b>Pengembangan dan pengelolaan terminal</b>	<b>Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>120.200.000,00</b>	<b>120.200.000,00</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	Terlaksananya Pengelolaan terminal	Jasa pengelolaan terminal	12 Bulan	12 Bulan	100	120.200.000,00	120.200.000,00	100
<b>B</b>	<b>Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>	<b>45%</b>	<b>93,28%</b>	<b>207,29</b>	<b>258.250.000,00</b>	<b>240.889.000,00</b>	<b>93,28</b>
<b>1</b>	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100	243.150.000,00	225.889.000,00	92,9
<b>2</b>	Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Laporan pemeriksaan dan pemeliharaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.000.000,00	15.000.000,00	100
<b>C</b>	<b>Program peningkatan layanan perpajakan</b>	<b>Persentase pelayanan jasa perpajakan</b>	<b>32%</b>	<b>82,77%</b>	<b>258,66</b>	<b>435.567.000,00</b>	<b>360.527.000,00</b>	<b>82,77</b>
<b>1</b>	Pengelolaan dan pengendalian parkir	Jasa pengelolaan dan pengendalian parkir	12 Bulan	12 Bulan	100	345.747.000,00	283.527.000,00	82
<b>2</b>	Penyediaan fasilitas parkir	Jumlah penyediaan fasilitas parkir	2 Unit	2 Unit	100	89.820.000,00	77.000.000,00	85,73
<b>D</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Persentase indeks pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>39%</b>	<b>99,53%</b>	<b>239,82</b>	<b>868.088.000,00</b>	<b>863.988.000,00</b>	<b>99,53</b>
<b>1</b>	Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas	Jumlah Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	856.888.000,00	854.788.000,00	99,75
<b>2</b>	Rekayasa lalu lintas	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	11.200.000,00	9.200.000,00	82,14

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2019

		rekayasa lalu lintas						
<b>E</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>57%</b>	<b>96,32%</b>	<b>168,98</b>	<b>339.500.000,00</b>	<b>326.994.000,00</b>	<b>96,32</b>
<b>1</b>	Pelaksana uji kir kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang telah diuji KIR	4.670 Unit	4.499 Unit	96,33	226.450.000,00	225.200.000,00	99,45
<b>2</b>	Pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100	113.050.000,00	101.794.000,00	90,04
<b>F</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>36%</b>	<b>97,25%</b>	<b>270,14</b>	<b>199.422.500,00</b>	<b>193.945.000,00</b>	<b>97,25</b>
<b>1</b>	Peningkatan dan pengembangan angkutan laut	Dokumen pengembangan angkutan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100	138.662.500,00	133.185.000,00	96,05
<b>2</b>	Peningkatan dan pengembangan angkutan darat	Dokumen pengembangan angkutan darat	6 Dokumen	6 Dokumen	100	60.760.000,00	60.760.000,00	100
<b>G</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>98,32%</b>	<b>98,32</b>	<b>942.939.500,00</b>	<b>927.106.547,00</b>	<b>98,32</b>
<b>1</b>	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	300 Lembar	300 Lembar	100	95.900.000,00	95.900.000,00	100
<b>2</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	63.994.600,00	59.751.700,00	93,37
<b>3</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 2 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 2 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	100	13.888.700,00	13.682.468,00	98,52
<b>4</b>	Penyediaan Jasa	Jasa administrasi	12 Bulan	12 Bulan	100	64.200.000,00	63.800.000,00	99,38

*LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2019*



	Administrasi Keuangan	keuangan						
5	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	36.000.000,00	36.000.000,00	100
6.	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	100	19.600.000,00	19.590.000,00	99,95
7	penyediaan alat tulis Kantor	Alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	100	64.560.000,00	64.559.000,00	100
8	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	111.340.000,00	105.724.775	94,96
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	100	4.000.000,00	4.000.000,00	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	100	62.660.000,00	59.170.038,00	94,43
11	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	100	30.000.000,00	30.000.000,00	100
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen perjalanan dinas ke luar daerah	60 Dokumen	58 Dokumen	96,67	363.846.200,00	361.928.566,00	99,47
<b>H</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/kendaraan operasional</b>	<b>75%</b>	<b>74,73%</b>	<b>99,64</b>	<b>180.582.000,00</b>	<b>179.936.202,00</b>	<b>99,64</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	14 Unit	14 Unit	100	180.582.000,00	179.936.202,00	99,64
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.396.000,00</b>	<b>99,97</b>

1	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD yang terlatih	2 Orang	2 Orang	100	12.400.000,00	12.396.000,00	99,97
<b>J</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>147.645.000,00</b>	<b>147.645.000,00</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20.000.000,00	20.000.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	4 Dokumen	4 Dokumen	100	20.400.000,00	20.400.000,00	100
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	17.395.000,00	17.395.000,00	100
4	Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100	60.500.000,00	60.500.000,00	100
5	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	29.350.000,00	29.309.800,00	99,86

### **3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari program kegiatan yang telah dijalankan yaitu kinerja tim yang bagus dan profesional walau secara bertahap untuk mencapai target bisa terlaksana, faktor kecukupan dana yang mendukung.

Penyebab kegagalan/penurunan kinerja dari program kegiatan yang telah dijalankan yaitu karena musim hujan yang berkepanjangan sehingga menyulitkan untuk merealisasikan belanja modal.

Dari penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tersebut terdapat solusi yang telah dilakukan perlu adanya sumber daya manusia yang mampu dan siap bekerja sehingga tercapainya target kinerja yang telah ditentukan.

### **3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Penggunaan Sumber Daya yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang membutuhkan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 100% menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dikategorikan efisien. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja diklasifikasikan tidak efisien. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **sesuai harapan**.

Efisiensi kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efisiensi kegiatan difokuskan pada capaian indikator output/outcome, benefit dan impact dari kegiatan yang bersangkutan. Adapun gambaran analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.10  
Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Program/Kegiatan terhadap Realisasi Keuangan Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			REALISASI KEUANGAN			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
<b>A</b>	<b>Pengembangan dan pengelolaan terminal</b>	<b>Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>120.200.000,00</b>	<b>120.200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>Sesuai Harapan</b>
1	Terlaksananya Pengelolaan terminal	Jasa pengelolaan terminal	12 Bulan	12 Bulan	100	120.200.000,00	120.200.000,00	100	Sesuai Harapan
<b>B</b>	<b>Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>	<b>45%</b>	<b>93,28%</b>	<b>207,29</b>	<b>258.250.000,00</b>	<b>240.889.000,00</b>	<b>93,28</b>	<b>Sesuai Harapan</b>
1	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100	243.150.000,00	225.889.000,00	92,9	Efisien
2	Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Laporan pemeriksaan dan pemeliharaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.000.000,00	15.000.000,00	100	Sesuai Harapan
<b>C</b>	<b>Program peningkatan layanan perparkiran</b>	<b>Persentase pelayanan jasa perparkiran</b>	<b>32%</b>	<b>82,77</b>	<b>258,66</b>	<b>435.567.000,00</b>	<b>360.527.000,00</b>	<b>82,77</b>	<b>Sesuai Harapan</b>
1	Pengelolaan dan pengendalian parkir	Jasa pengelolaan dan pengendalian parkir	12 Bulan	12 Bulan	100	345.747.000,00	283.527.000,00	82	Efisien
2	Penyediaan fasilitas parkir	Jumlah penyediaan fasilitas parkir	2 Unit	2 Unit	100	89.820.000,00	77.000.000,00	85,73	Efisien
<b>D</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Persentase indeks pengendalian dan pengamanan lalulintas</b>	<b>39%</b>	<b>99,53</b>	<b>239,82</b>	<b>868.088.000,00</b>	<b>863.988.000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>Sesuai Harapan</b>
1	Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas	Jumlah Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	856.888.000,00	854.788.000,00	99,75	Efisien

		Lalulintas							
<b>2</b>	Rekayasa lalu lintas	Jumlah kegiatan rekayasa lalu lintas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	11.200.000,00	9.200.000,00	82,14	Efisien
<b>E</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>57%</b>	<b>96,32</b>	<b>168,98</b>	<b>339.500.000,00</b>	<b>326.994.000,00</b>	<b>96,32</b>	<b>Sesuai Harapan</b>
<b>1</b>	Pelaksana uji kir kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang telah diuji KIR	4.670 Unit	4.499 Unit	96,33	226.450.000,00	225.200.000,00	99,45	Tidak efisien
<b>2</b>	Pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100	113.050.000,00	101.794.000,00	90,04	Efisien
<b>F</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>36%</b>	<b>97,25</b>	<b>270,14</b>	<b>199.422.500,00</b>	<b>193.945.000,00</b>	<b>97,25</b>	<b>Sesuai Harapan</b>
<b>1</b>	Peningkatan dan pengembangan angkutan laut	Dokumen pengembangan angkutan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100	138.662.500,00	133.185.000,00	96,05	Efisien
<b>2</b>	Peningkatan dan pengembangan angkutan darat	Dokumen pengembangan angkutan darat	6 Dokumen	6 Dokumen	100	60.760.000,00	60.760.000,00	100	Sesuai Harapan
<b>G</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>98,32%</b>	<b>98,32</b>	<b>942.939.500,00</b>	<b>927.106.547,00</b>	<b>98,32</b>	<b>Sesuai Harapan</b>
<b>1</b>	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	300 Lembar	300 Lembar	100	95.900.000,00	95.900.000,00	100	Sesuai Harapan
<b>2</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	63.994.600,00	59.751.700,00	93,37	Efisien
<b>3</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah pemeliharaan dan	5 unit mobil	5 unit mobil	100	13.888.700,00	13.682.468,00	98,52	Efisien

	perizinan kendaraan dinas operasional	perizinan kendaraan dinas/operasional	dinas, 2 unit bus 21 kursi, 2 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	dinas, 2 unit bus 21 kursi, 2 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi						
<b>4</b>	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100	64.200.000,00	63.800.000,00	99,38	Efisien	
<b>5</b>	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	36.000.000,00	36.000.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>6.</b>	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	100	19.600.000,00	19.590.000,00	99,95	Efisien	
<b>7</b>	penyediaan alat tulis Kantor	Alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	100	64.560.000,00	64.559.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>8</b>	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	111.340.000,00	105.724.775	94,96	Efisien	
<b>9</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	100	4.000.000,00	4.000.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>10</b>	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	100	62.660.000,00	59.170.038,00	94,43	Efisien	
<b>11</b>	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	100	30.000.000,00	30.000.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>12</b>	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen perjalanan dinas ke luar daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	363.846.200,00	361.928.566,00	99,47		
<b>H</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Cakupan ketersediaan</b>	<b>75%</b>	<b>74,73%</b>	<b>99,64</b>	<b>180.582.000,00</b>	<b>179.936.202,00</b>	<b>99,64</b>	<b>Sesuai Harapan</b>	

<b>Aparatur</b>	<b>kendaraan dinas/kendaraan operasional</b>								
<b>1</b> Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	14 Unit	14 Unit	100	180.582.000,00	179.936.202,00	99,64	Efisien	
<b>I Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.396.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>Sesuai Harapan</b>	
<b>1</b> Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD yang terlatih	2 Orang	2 Orang	100	12.400.000,00	12.396.000,00	99,97	Efisien	
<b>J Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>147.645.000,00</b>	<b>147.645.000,00</b>	<b>100</b>	<b>Sesuai Harapan</b>	
<b>1</b> Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20.000.000,00	20.000.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>2</b> Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	4 Dokumen	4 Dokumen	100	20.400.000,00	20.400.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>3</b> Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	17.395.000,00	17.395.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>4</b> Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	60.500.000,00	60.500.000,00	100	Sesuai Harapan	
<b>5</b> Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	29.350.000,00	29.309.800,00	99,86	Efisien	

## A. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pemakaian Sumber Daya Keuangan yang dikelola guna menjalankan program kegiatan yang telah ditargetkan. Berikut uraian dari realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi :

Tabel 3.11  
Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>942.939.500,00</b>	<b>927.106.547,00</b>	<b>98,32</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	95.900.000,00	95.900.000,00	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	63.994.600,00	59.751.700,00	93,37
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.888.700,00	13.682.468,00	98,52
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.200.000,00	63.800.000,00	99,38
5.	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	100
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.600.000,00	19.590.000,00	99,95
7.	Penyediaan alat tulis kantor	64.560.000,00	64.559.000,00	100
8.	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	111.340.000,00	105.724.775	94,96
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	62.660.000,00	59.170.038,00	94,43
11.	Penyediaan makan dan minum	30.000.000,00	30.000.000,00	100
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	363.846.200,00	361.928.566,00	99,47
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>180.582.000,00</b>	<b>179.936.202,00</b>	<b>99,64</b>
1.	Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional	180.582.000,00	179.936.202,00	99,64
<b>C</b>	<b>Program peningkatan Kpasitas Sumber Daya aparatur</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.396.000,00</b>	<b>99,97</b>
1.	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
2.	Kontribusi Kepesertaan	10.400.000,00	10.396.000,00	99,96
<b>D</b>	<b>Program peningkatan</b>	<b>147.645.000,00</b>	<b>147.645.000,00</b>	<b>100</b>



<b>pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00 100
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semester	20.400.000,00	20.400.000,00 100
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17.395.000,00	17.395.000,00 100
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/Satuan Kerja Perangkat Daerah	60.500.000,00	60.500.000,00 100
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	29.350.000,00	29.309.800,00 99,86
<b>E</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan terminal</b>	<b>120.200.000,00</b>	<b>120.200.000,00 100</b>
1.	Pengelolaan Terminal	120.200.000,00	120.200.000,00 100
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Layanan Parkir</b>	<b>435.567.000,00</b>	<b>360.527.000,00 82,77</b>
1.	Pengelolaan dan Pengendalian Parkir	345.747.000,00	283.527.000,00 82,00
2.	Penyediaan Fasilitas Parkir	89.820.000,00	77.000.000,00 85,73
<b>G</b>	<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>258.250.000,00</b>	<b>240.889.000,00 93,28</b>
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	243.150.000,00	225.889.000,00 92,90
2.	Pemeriksaan dan Pemeliharaan Sarana Perhubungan	15.000.000,00	15.000.000,00 100
<b>H</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas</b>	<b>868.088.000,00</b>	<b>863.988.000,00 99,53</b>
1.	Pemeriksaan dan Penertiban Lalu Lintas	856.888.000,00	854.788.000,00 100
2.	Rekayasa Lalu Lintas	11.200.000,00	9.200.000,00 82,14
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>199.422.500,00</b>	<b>193.945.000,00 97,25</b>
1.	Peningkatan dan Pengembangan Angkutan Laut	138.662.500,00	133.185.000,00 96,05
2.	Peningkatan dan Pengembangan Angkutan Darat	60.760.000,00	60.760.000,00 100
<b>J</b>	<b>Program Peningkatan Kelaikan dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>339.500.000,00</b>	<b>326.994.000,00 96,32</b>
1.	Pelaksanaan Uji KIR Kendaraan Bermotor	226.450.000,00	225.200.000,00 99,45
2.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	113.050.000,00	101.794.000,00 90,04
<b>JUMLAH</b>		<b>3.835.834.000,00</b>	<b>3.644.235.169,00 95,01</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2019

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun ini merupakan media pertanggung jawaban atas pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langka-langka perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No 29 Tahun 2013. Dari Lembaga administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2019 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019 sebagai realisasi atas rencana kinerja Tahun 2019. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Pengendalian belanja ditetapkan menjadi 3 target yaitu :

1. Alokasi Belanja yang tepat sasaran
2. Alokasi belanja yang berkeadilan sosial
3. Efisiensi pengadaan barang dan jasa

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dinas Perhubungan Kota Bima senantiasa terbuka untuk menerima masukan dan menjalin kerjasama dengan semua pihak yang beritikad baik untuk penyempurnaan program/kegiatan mendatang sehingga dapat memajukan taraf hidup masyarakat.